



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL IKN NUSANTARA

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Muda
sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo menargetkan penyelesaian konstruksi jalan tol akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli 2024. Tol ini dibangun untuk menghubungkan kawasan Balikpapan ke IKN sejauh kurang lebih 40 km serta terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol IKN sebagai konektivitas menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dalam pelaksanaan konstruksi berjalan, pemerintah juga melakukan upaya pembebasan lahan Jalan Tol IKN mencapai Rp414 miliar. Selanjutnya juga akan dilakukan pekerjaan *overpass*, beautifikasi, termasuk tambahan *ramp* di ruas Jalan Tol IKN tersebut. Adanya akses Jalan Tol IKN, mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju IKN yang sebelumnya memerlukan waktu 1,5 - 2 jam menjadi hanya 30 - 45 menit.

Kementerian PUPR akan melakukan peningkatan kualitas layanan jalan tol pada aspek penghijauan di sepanjang ruas tol dan *rest area*. Penghijauan menjadi penting karena memberikan berbagai manfaat, antara lain mengurangi pencemaran udara, menyerap kebisingan, mencegah erosi, meningkatkan serapan air, pemecah angin untuk mengurangi efek hampasan angin pada pengemudi, penghalang silau dari kendaraan yang berlawanan arah, penahan benturan untuk menghindari fatalitas jika terjadi kecelakaan serta menjaga keseimbangan sistem ekologi. Sepanjang ruas tol tersebut akan ditanami pohon tiga deret dengan jenis yang variatif, di mana hal ini yang akan membedakan dengan ruas tol lainnya yang hanya ditanami hanya satu atau dua jenis pohon dalam satu deret. Selain penghijauan, pemerintah akan menambahkan drainase di sepanjang ruas tol untuk mengatasi genangan ketika hujan melanda.

Saat ini, pembangunan Jalan Tol IKN terbagi atas tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km. Progres pengerjaan pada Seksi 3A sudah mencapai 22%, Seksi 3B sebesar 36%, dan Seksi 5A sebesar 53%. Pada Seksi 3A akan dibangun Jembatan Sungai Wain dengan panjang 913 meter di sisi utara dan 916 meter di sisi selatan. Sementara pada Seksi 5A akan dibangun Jembatan Dirgahayu. Setelah ketiga seksi selesai akan dilanjutkan dengan pembangunan Seksi 5B yang terdiri dari Seksi 5B-1 segmen Jembatan Pulau Balang-Simpang Rencana Bandara VIP dan Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VIP-Riko. Selain itu juga, akan dilakukan pembangunan Seksi 6A Riko-Rencana *Outer Ring Road* IKN dan Seksi 6B Rencana *Outer Ring Road*-Simpang 3 ITCI. Rencananya pada ruas tol tersebut akan terdapat 4 hingga 6 lajur.

Selanjutnya, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda juga akan menjadi wajah infrastruktur IKN yang mengusung konsep *smart forest city* yang memberikan fokus kepada aspek lingkungan. Oleh karenanya Kementerian PUPR juga melakukan penilaian jalan tol berkelanjutan terhadap kualitas layanan jalan tol dan *rest area* pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Terdapat tiga aspek dalam penilaian ini, yaitu fungsi utama jalan tol, fungsi pendukung di *rest area*, serta

fungsi pelengkap di *rest area*. Fungsi utama jalan tol mencakup aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Fungsi pendukung jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol yang merujuk pada terpenuhinya indikator standar pelayanan minimal (SPM) *rest area*, seperti tersedianya toilet, area parkir, SPBU, tempat makan dan minum, mushola, dan lain sebagainya. Sementara fungsi pelengkap di *rest area* berupa indikator *beyond* SPM yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan *rest area* seperti kebersihan *rest area*, manajemen pengelolaan sampah, *branding* ekonomi lokal melalui UMKM, kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta penghijauan.

Atensi DPR

Perkembangan pembangunan Jalan Tol IKN perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI penting untuk terus memantau keberlanjutan pembangunan Jalan Tol IKN sesuai waktu yang ditargetkan, karena jalan tol tersebut merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas orang dan barang ke wilayah IKN. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan Jalan Tol IKN dapat selesai sesuai dengan target dengan tidak mengabaikan faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Selain itu juga pembangun Jalan Tol IKN juga perlu dilengkapi dengan pembangunan *rest area* yang memadai dengan jarak antar *rest area* yang cukup. Proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol IKN juga perlu mendapat perhatian yang serius bagi Komisi V DPR RI, agar proses pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat yang terimbas dari pembangunan Jalan Tol IKN tersebut.

Sumber

bisnis.com, 21 September 2023;
bpjt.pu.go.id, 14 Maret 2023;
cnbcindonesia.com, 21 September 2023;
ekbis.sindonews.com, 28 Agustus 2023;
kompas.com, 22 September 2023; dan
pu.go.id, 21 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.